

|              |                       |                                                                                                                  |
|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                       | <i>Prosiding Seminar Nasional "Inovasi Teknologi Pertanian dalam Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan"</i> |
| Info Artikel | Received: 09/08/2025  | Vol. 1 No. 1 Tahun 2025                                                                                          |
|              | Revised : 12/10/2025  | ISSN:                                                                                                            |
|              | Accepted : 20/12/2025 |                                                                                                                  |

## Implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Sriani<sup>1</sup>, Windy Manullang<sup>2</sup>, Puji Wahyu Mulyani<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, Jl. Binjai Km. 10 Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Koresponden Email: sriiani139@gmail.com

### Abstrak.

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan inisiatif pemerintah untuk membantu petani meningkatkan produksi dan pendapatan melalui penggunaan bibit sawit unggul. Namun, pelaksanaannya di Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, belum optimal. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi PSR berdasarkan fungsi manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasilnya Desa A menunjukkan pelaksanaan yang lebih baik dibandingkan Desa B dan C, terutama dalam hal pendampingan administrasi, penerapan Good Agricultural Practices (GAP), dan monitoring kebun secara rutin.

**Kata Kunci:** Impelementasi, Fungsi Manajemen (POAC), Kecamatan Silangkitang

### Abstract.

*The Smallholder Oil Palm Rejuvenation Program (PSR) is a government initiative to help farmers increase production and income through the use of superior oil palm seeds. However, its implementation in Silangkitang District, South Labuhanbatu Regency, has not been optimal. This study aims to examine the implementation of PSR based on the POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling) management function using a qualitative descriptive approach. The results showed that Village A demonstrated better implementation than Villages B and C, particularly in terms of administrative assistance, implementation of Good Agricultural Practices (GAP), and routine plantation monitoring.*

**Keyword :** Implementation, Management Function (POAC), Silangkitang Dstric

### PENDAHULUAN

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) merupakan salah satu komoditas perkebunan utama di Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena berperan sebagai sumber minyak nabati untuk berbagai produk, seperti pangan, minyak industri, dan bahan bakar nabati (biodiesel) [1]. Sawit menyebabkan tanaman ini memiliki arti penting bagi pembangunan perkebunan nasional dengan menciptakan kesempatan kerja yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat [2].

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah terluas ke 4 (empat) sebagai produsen kelapa sawit setelah Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sumatera Utara memiliki luas lahan kelapa sawit 1.370.407 Ha dengan produksi 5.051.511 [3]. Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan sentra kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara dengan luas perkebunan rakyat 43.450 Ha, produksi 734.900 Ton, dan produktivitas 16,91 Ton/Ha [4]. Berdasarkan Programa salah satu kecamatannya, yakni Silangkitang, memiliki luas 7.015,6 hektar dengan produksi 27.752,5 Ton dan produktivitas 3,95 Ton/Ha. Angka ini tergolong rendah, karena rata-rata produksi

bulanan hanya 0,35 Ton/Ha, sedangkan idealnya 2–3 Ton/Ha/Bulan.

Rendahnya produksi kelapa sawit disebabkan oleh umur tanaman kelapa sawit yang sudah mencapai umur ekonomis yaitu telah 25 Tahun, selain itu penggunaan bibit yang tidak unggul juga menyebabkan penurunan produksi kelapa sawit [5]. Untuk itu adanya permasalahan ini perlunya dilakukan peremajaan untuk memperbaiki tanaman kelapa sawit dan memperbaiki produksi kelapa sawit.

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bertujuan membantu petani memperbarui kebun sawit dengan bibit unggul serta mencegah pembukaan lahan ilegal, terutama di kawasan hutan. Dengan adanya Program PSR di harapkan produksi dan produktivitas bisa meningkat serta dapat meningkatnya kesejahteraan petani [6]. Pelaksanaan Program PSR ini dihadapkan pada faktor pembiayaan atau pendanaan yang cukup besar [7]. Dalam hal ini pemerintah memberikan bantuan akses permodalan kepada petani untuk melakukan peremajaan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) [8]. BPDP memberikan dana kepada petani sebesar Rp.60.000.000/ hektar/ petani dengan luasan

|              |                       |                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                       | <b><i>Prosiding Seminar Nasional "Inovasi Teknologi Pertanian dalam Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan"</i></b> |
| Info Artikel | Received: 09/08/2025  | Vol. 1 No. 1 Tahun 2025                                                                                                 |
|              | Revised : 12/10/2025  | ISSN:                                                                                                                   |
|              | Accepted : 20/12/2025 |                                                                                                                         |

maksimal kebun yang dibiayai adalah 4 hektar /petani [9].

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan Program PSR di Kecamatan Silangkitang. Pengkajian kualitatif adalah metode pengkajian yang berlandaskan filsafat positivisme atau enterpretif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana pengkaji adalah sebagai intrumen kunci (Sugiyono, 2021).

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei 2025 di Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pemilihan lokasi pengkajian dilakukan dengan metode sengaja (purposive) dengan mempertimbangkan bahwa Silangkitang merupakan Kecamatan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang saat ini aktif melaksanakan Program PSR dengan peserta yang cukup signifikan, luas areal PSR di Kecamatan Silangkitang mencapai 3.411 Ha, pengkaji memiliki ketertarikan terhadap isu PSR di Kecamatan Silangkitang, serta lokasi ini mudah di jangkau secara geografis dan ekonomis sehingga pengumpulan data.

Subjek pengkajian disebut sebagai responden atau informan jika subjek tersebut merupakan manusia atau orang. Dalam pengkajian kualitatif, subjek pengkajian adalah orang yang dapat menjadi sumber informasi. Penentuan subjek pengkajian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan yaitu informan merupakan orang yang dianggap mengetahui dan memiliki informasi yang banyak terutama terkait Program PSR teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data primer di dapatkan langsung dari wawancara mendalam terhadap responden, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen instransi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Labuhanbatu Selatan [10].

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion

drawing/verifikation. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan Triangulasi, diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi dibagi menjadi 3 yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

Program PSR merupakan inisiatif pemerintah yang mulai direncanakan sejak Tahun 2017 untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan pendapatan petani kelapa sawit. Di Kecamatan Silangkitang, pengajuan proposal pertama kali dilakukan pada Tahun 2019 dan terealisasi pada Tahun 2021. Pelaksanaan program ini diharapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

Terdapat beberapa kriteria sasaran dalam Implementasi Program PSR yaitu :

1. Tergabung dalam kelembagaan pekebun seperti kelompok tani dan telah terdaftar di simluhtan.
2. Memiliki surat legalitas lahan (sertifikat tanah) dan apabila tidak ada maka wajib di urus ke kantor desa untuk meminta surat keterangan tanah (SKT).
3. Peremajaan diberikan kepada petani dengan maksimal luas lahan 4 Ha dengan syarat 1 lahan tidak boleh memiliki 2 nama, dan apabila sudah terdaftar di awal tidak di perbolehkan untuk mendaftar lagi di lahan yang lain.
4. Mengusahakan lahan kelapa sawit yang telah melewati umur produktif yaitu umur 25 tahun, juga merupakan tanaman kelapa sawit yang produktivitsnya kurang dari 10 Ton/Hektar/Tahun, dan merupakan kebun kelapa sawit yang tidak menggunakan bibit unggul.

Dalam implementasi Program PSR terdapat pihak yang terlibat dalam implementasinya diantaranya yaitu :

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2. PT Sucofindo
3. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutan (KLHK)
4. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
5. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPBD)

|              |                       |                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                       | <b><i>Prosiding Seminar Nasional "Inovasi Teknologi Pertanian dalam Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan"</i></b> |
| Info Artikel | Received: 09/08/2025  | Vol. 1 No. 1 Tahun 2025                                                                                                 |
|              | Revised : 12/10/2025  | ISSN:                                                                                                                   |
|              | Accepted : 20/12/2025 |                                                                                                                         |

6. Bank Sumut (Bank yang telah di sepakati bersama)
7. Pihak Ketiga (pemilik penangkaran bibit)
8. Ketua Kelompok Tani
9. Petani

Pelaksanaan Program PSR harus melalui tahap pengajuan sebelum program tersebut terealisasi di lapangan adapaun alur pengajuannya yaitu sebagai berikut :



**Gambar 1. Alur Pengajuan PSR**

Sumber : Data Primer 2025

Berdasarkan Gambar 3 diatas setiap instansi memiliki tugas yang harus dilakukan untuk terealisasinya pelaksanaan Program PSR sebagai berikut :

1. Ketua kelompok tani melakukan pendataan dan pengumpulan syarat pengusulan atau pendaftaran Program PSR yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan sertifikat tanah (legalitas lahan) dan mengumpulkan semua data petani.
2. Ketua kelompok tani mengirimkan semua persyaratan yang telah di lengkapi petani ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk di verifikasi.
3. Dinas melakukan pemeriksaan dokumen administrasi, status kepemilikan lahan untuk melihat apakah benar lahan pribadi petani, luas lahan, dan data lahan benar, dan melihat apakah lahan memang sudah memenuhi syarat teknis (usia tanaman kelapa sawit yang sudah melebihi umur produktif, produktivitasnya yang rendah dan tanaman kelapa sawit yang sudah rusak karena salah dalam menggunakan bibit.
4. Pada tahap verifikasi ini ada dilibatkan dari tim pertanahan dan kehutanan. Tim kehutanan mengecek status lahan melalui peta kawasan hutan, jika lahan bukan termasuk kawasan hutan misalnya hutan lindung/hutan produksi maka akan di

keluarkan SK Bukan Kawasan Hutan (SKBK), karena tanpa SKBK proposal tidak bisa di lanjutkan. Selanjutnya tim pertanahan ini biasanya di lakukan apabila tim dinas iliki keraguan di dokumen lahan misalnya tumpang tindih lahan.

5. Lalu di lakukan verifikasi oleh pihak PT. Scofindo. Verifikasi dilakukan dengan mengecek kondisi fisik kebun (usia sawit, tanaman rusak, produktivitas), melakukan pengukuran ulang lahan (dengan GPS/survey lapangan), memastikan Lokasi lahan sesuai dokumen yang di ajukan, dan memastikan lahan yang akan mendapatkan dana PSR bukan lahan peralihan tetapi lahan yang dari sawit ke sawit.
6. Lalu dilakukan pengajuan atau pengusulan ke BPDP, jika verifikasi administrasi dan lahan lolos dengan SKBK dan data valid, maka selanjutnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengajukan proposal ke BPDP, proses ini umumnya lewat platfrom Sistem Manajemen dan Informasi Peremajaan Sawit Rakyat (SMART PSR).
7. Penerbitan (rekomtek), rekomendasi dinas teknis Perkebunan menerbitkan rekomendasi teknis, untuk kebun yang layak diremajakan, administrasi dan lahan yang valid, dan juga lahan bukan kawasan hutan. Rekomtek ini dokumentasi resmi untuk BPDP sebagai dasar keputusan.
8. Persetujuan oleh BPDP, BPDP menilai kelayakan teknis dari rekomtek, kelayakan administrasi (data ke lahan) dan sesuai kuota dan ketersediaan dana, jika semua sudah lengkap ataupun dan diterima maka BPDP menerbitkan persetujuan dan kontrak hibah.
9. Setelah itu dilakukan tanda tangan kontrak yang di lakukan oleh ketiga belah pihak yaitu BPDP, lembaga pekebun (perwakilan kelompok tani), dan juga pihak bank.
10. Maka dilakukan realisasi program PSR, dengan dana yang telah di setujui dan dana yang telah masuk rekening pihak lembaga pekebun (kelompok tani).

Dalam implementasi Program PSR di Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini dapat di lihat berdasarkan 4 fungsi manajemen yaitu *Planning, Organizing, Controlling* (POAC).

### 1. *Planning*

|              |                       |                                                                                                                  |
|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                       | <b>Prosiding Seminar Nasional "Inovasi Teknologi Pertanian dalam Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan"</b> |
| Info Artikel | Received: 09/08/2025  | Vol. 1 No. 1 Tahun 2025                                                                                          |
|              | Revised : 12/10/2025  | ISSN:                                                                                                            |
|              | Accepted : 20/12/2025 |                                                                                                                  |

Perencanaan (Planning) dalam kajian ini yaitu suatu kegiatan yang telah di rencanakan sebelum program dilaksanakan dengan tujuan agar Program PSR di Kecamatan Silangkitang dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan Program PSR ini di rancang secara terstruktur dan terpadu dengan fokus pada peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan petani. Hal ini menjadi landasan untuk mendukung pembangunan sektor perkebunan yang lebih berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi signifikan untuk kedepannya.

(a) Meningkatkan Produksi, dan Produktivitas Kelapa Sawit

Tahap perencanaan dalam Program PSR merupakan fondasi awal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program secara menyeluruh. Berdasarkan hasil wawancara bersama petani dan hasil observasi dilapangan, faktanya banyak petani yang mengatakan bahwa mereka mengalami permasalahan yaitu menurunnya produksi dan produktivitas kelapa sawit, dan dapat di klasifikasi bahwa produksi petani untuk perbulannya hanya mencapai 0,32 Ton /Ha/Bulan. Hal ini dikarenakan banyaknya tanaman kelapa sawit yang sudah tua dan umurnya sudah memasuki umur 25 tahun lebih, selain itu kesalahan dalam penggunaan bibit juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka dirancang Program PSR untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pernyataan di atas juga didukung dengan hasil wawancara mendalam yang dilakukan bersama pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut:

*"PSR ini dilakukan di Kecamatan Silangkitang karena tanaman kelapa sawit petani sudah melebihi umur produktif yaitu 25 tahun, selain itu terdapat juga petani yang tanamannya sudah rusak karena salah dalam penggunaan bibit, kebanyakan mereka menggunakan bibit asalan (bibit tidak unggul), dan juga pemahaman mereka tentang budidaya kelapa sawit masih minim hingga perlu sekali di lakukan pendampingan secara intensif oleh penyuluh ataupun dari Dinas"*(Wawancara dengan anggota Dinas Kabupaten Labuhanbatu Selatan bagian

Gambar 2. Kondisi Tanaman Kelapa Sawit

Perencanaan Program PSR diarahkan



untuk menjawab permasalahan mendasar yang dihadapi petani sawit rakyat di Kecamatan Silangkitang, salah satunya adalah rendahnya pendapatan petani akibat penurunan hasil panen. Berdasarkan hasil wawancara mendalam bersama petani pendapatan yang mereka dapatkan selama masa tanaman mereka yang sudah tidak lagi produktif yaitu hanya berkisar Rp.800.000 – Rp.2.400.000/Bulan. Dengan menurunnya pendapatan sementara biaya hidup yang semakin tinggi membuat petani mencari solusi dari permasalahan yang sedang di hadapi. Adanya Program PSR harapannya dapat membantu petani dalam meningkatkan pendapatan.

## 2. Organizing

Tahap pengorganisasian yang tampak nyata adalah adanya kelembagaan pekebun, berupa kelompok tani. Kelembagaan ini menjadi wadah bagi petani untuk saling bekerja sama, saling mendukung, dan mengorganisir seluruh tahapan pelaksanaan Program PSR

(a) Adanya Kelembagaan Pekebun

Kecamatan Silangkitang untuk setiap Desa dan petani telah memiliki lembaga pekebun yaitu berupaka kelompok tani. Adanya kelompok tani ini menjadi salah satu syarat dalam pelaksanaan Program PSR. Pada ke tiga Desa yang telah melaksanakan PSR telah membentuk kelompok tani yaitu kelompok tani Abadi Jaya yang ada di Desa Binanga dua, kelompok tani karya yang ada di Desa Aek Goti, dan kelompok tani Maju Bersama Labusel yang ada di Desa Mandalasena. Setiap kelompok tani memiliki struktur kepengurusan yang telah di bentuk. Kepengurusan ini terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara.

(b) Meningkatkan Pendapatan Petani

|              |                       |                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                       | <b><i>Prosiding Seminar Nasional "Inovasi Teknologi Pertanian dalam Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan"</i></b> |
| Info Artikel | Received: 09/08/2025  | Vol. 1 No. 1 Tahun 2025                                                                                                 |
|              | Revised : 12/10/2025  | ISSN:                                                                                                                   |
|              | Accepted : 20/12/2025 |                                                                                                                         |

Di Kecamatan Silangkitang jika ditinjau dari hasil wawancara dan observasi kepengurusan kelompok tani masih belum terlaksana secara optimal dan masih banyak pengurus yang pasif dan belum melaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang di emban. Di kelompok tani Abadi Jaya struktur kepengurusan sudah berjalan dengan baik dan menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab nya, namun kelompok tani Karya dan Maju Bersama Labusel untuk struktur kepengurusan yang telah dibentuk masih belum berjalan dengan optimal dan masih banyak pengurus yang pasif dan belum melaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang di emban.

#### (b) Adanya Tenaga Pendamping

Dalam pelaksanaan Program PSR, keberadaan tenaga pendamping menjadi salah satu elemen penting yang mendukung keberhasilan di tingkat lapangan. Tenaga pendamping memiliki peran strategis dalam menjembatani antara petani dengan pelaksana program, serta memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan Kecamatan Silangkitang sudah adanya tenaga pendamping yang ditugaskan mendampingi Program PSR.

Tenaga pendamping ini membantu petani mulai dari administrasi hingga pelaksanaan dilapangan. Tenaga pendamping berasal dari Dinas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan jumlah 8 orang tiap kelompok tani yang melaksanakan Program PSR. Kehadiran tenaga pendamping ini telah berjalan dengan baik dan aktif di beberapa kelompok tani namun masih terdapat juga beberapa Desa lainnya yang masih belum mendapatkan pendampingan secara optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi yang baik antar stakeholder.

### 3. *Actuating*

Tahap *actuating* dalam implementasi Program PSR merupakan tahapan krusial di mana seluruh rencana yang telah disusun mulai dijalankan di lapangan. Fokus utama pada tahap ini mencakup pelaksanaan proses administrasi dan persiapan teknis yang menjadi fondasi awal keberhasilan replanting tanaman kelapa sawit.

#### (a) Persiapan Administrasi

Persiapan administrasi diawali dengan pengumpulan dokumen-dokumen penting dari petani peserta program. Dokumen yang dimaksud meliputi : KTP, KK dan Surat Keterangan Tanah (Sertifikat Tanah). Petani

juga harus tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar di simluhtan. Dalam pelaksanaannya, proses administrasi ini melibatkan kerja sama antara petani, ketua kelompok tani, perangkat desa, dan tenaga pendamping. Kegiatan persiapan administrasi ini menjadi salah satu tolak ukur awal keberhasilan pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi Kecamatan Silangkitang sendiri untuk tahap persiapan administrasi sudah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam administrasi yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Program PSR yaitu masih adanya masalah tumpang tindih lahan yang belum diselesaikan dari kedua belah pihak. Setelah proses pengumpulan berkas dilaksanakan maka tahap selanjutnya melaksanakan verifikasi. Selain itu koordinasi antar stakeholder juga sangat perlu di perhatikan dalam proses administrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan koordinasi antar stakeholder dapat dikatakan baik namun masih mengalami beberapa kendala yaitu ditemukannya seperti belum maksimalnya koordinasi dengan mitra perusahaan, ataupun dengan pihak dinas serta lamanya proses brokrasi verifikasi lahan.

#### (b) Persiapan Teknis Peremajaan Kelapa Sawit

Setelah dengan tahap administrasi, persiapan teknis dilanjutkan peremajaan. Persiapan teknis ini meliputi beberapa hal, mulai dari persiapan lahan, pengadaan bibit unggul bersertifikat, hingga penyediaan alat dan bahan yang diperlukan. persiapan teknis sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2025 yaitu :

- (1) Penumbangan secara serempak, pada tahap ini untuk tanaman kelapa sawit yang sudah tua dan seharusnya sudah direplanting maka harus dilakukan penumbangan secara keseluruhan.
- (2) Chipping dan perumpukan merupakan pencacahan tanaman kelapa sawit yang telah di tumbang lalu di kumpulkan dan dirumpukan untuk mempercepat proses pelapukan.
- (3) Pembersihan lahan dari sisa – sisa gulma dan sampah organik.
- (4) Pemancangan (steking) dilakukan setelah lahan di bersihkan maka di lakukan pemancangan dengan ukuran yang digunakan di Kecamatan Silangkitang yaitu 9×9 meter.

|              |                       |                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                       | <b><i>Prosiding Seminar Nasional "Inovasi Teknologi Pertanian dalam Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan"</i></b> |
| Info Artikel | Received: 09/08/2025  | Vol. 1 No. 1 Tahun 2025                                                                                                 |
|              | Revised : 12/10/2025  | ISSN:                                                                                                                   |
|              | Accepted : 20/12/2025 |                                                                                                                         |

- (5) Pembuatan lubang tanam, setelah di tentukan jarak tanamnya maka di lakukan pembuatan lubang untuk dilakukan penanaman pada tanaman kelapa sawit.
- (6) Pemberian pupuk dolomit, pemberian pupuk dolomit dilakukan sebelum penanaman untuk memperbaiki pH dan kesuburan tanah.
- (7) Penanaman dengan menggunakan bibit unggul, penggunaan bibit unggul di lakukan agar sejalan dengan tujuan dilakukan PSR yaitu untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan petani kelapa sawit.
- (8) Perawatan dilakukan setelah tahap penanaman, mulai dari pemupukan pengendalian gulma dan hama. Setelah lebih dari 1 tahun kebun akan di rawat sendiri oleh petani tanpa adanya lagi pendampingan dan monitoring oleh pihak dinas ataupun BPDP.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan kegiatan teknis peremajaan di Kecamatan Silangkitang ini sudah di lakukan sesuai dengan yang telah di tentukan oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2025, dan setiap tahapannya selalu di monitoring dan diawasi agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan Program PSR. Selain itu di Kecamatan Silangkitang sendiri dalam pelaksanaannya tidak dilakukan oleh petaninya langsung melainkan melalui kerja sama dengan pihak ke tiga baik itu mulai dari pengolahan lahan hingga perawatan dilakukan oleh pihak ketiga bukan petaninya langsung seperti yang dinyatakan oleh petani :

*"Bahwa pelaksanaan program PSR ini mereka tidak ada campur tangan semua di kerjakan oleh mitra seperti kontraktor penanaman dll namun mereka dilibatkan untuk mengetahui hal itu karena proses tersebut dilakukan dilahan mereka bahkan jika mereka ingin membantu proses tersebut maka dengan senang hati pihak minta memberikannya"* (Wawancara bersama anggota kelompok tani Maju Bersama Labusel, T, (46 Tahun) 03 Mei 2025).

### 3. Controlling

Tahap controlling (pengawasan) dalam manajemen berfungsi untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, standar, dari target PSR. Pada tahap controlling yang dilihat yaitu :

- (a) Pengawasan Monitoring dan Pengawasan Program

Pengawasan dan monitoring menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program tetap berjalan sesuai dengan pedoman teknis, prosedur, dan target yang telah ditetapkan. Di lapangan, pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak seperti Dinas Perkebunan, tenaga pendamping PSR. Mereka secara aktif melakukan kunjungan lapangan untuk memantau progres pelaksanaan program, memberikan arahan teknis, serta memastikan bahwa kegiatan peremajaan dilakukan sesuai standar budidaya kelapa sawit yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi fakta di lapangan bahwa Kecamatan Silangkitang menunjukkan bahwa pengawasan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Seperti masih terdapat kelompok tani atau petani yang belum mendapatkan pendampingan intensif, terutama dalam hal teknis penanaman, pemupukan awal, dan pemeliharaan tanaman muda. Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga pendamping dan jarak antar kebun juga menjadi kendala tersendiri dalam upaya pengawasan yang maksimal.

- (b) Pengawasan dan Monitoring Secara Berkala

Salah satu elemen kunci dalam tahap ini adalah pengawasan dan monitoring yang dilakukan secara berkala. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan, mendeteksi kendala sejak dini, serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan sesuai sasaran. Pengawasan tidak hanya dilakukan sekali, melainkan dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai tahapan kegiatan, mulai dari pembukaan lahan, penanaman bibit, pemeliharaan, hingga pemupukan awal. Dalam setiap kunjungan, petugas memberikan pengarahan teknis, mendampingi proses pemeliharaan, dan melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi fisik tanaman.

Monitoring juga dilakukan secara berkala, biasanya setiap bulan atau per empat bulan, tergantung pada jadwal kegiatan dan kesiapan tenaga teknis. Hasil monitoring tersebut kemudian dituangkan dalam laporan, baik dalam bentuk dokumentasi visual maupun data tertulis. Tim monitoring akan mengevaluasi pertumbuhan tanaman, kesesuaian penggunaan dana, hingga tingkat partisipasi petani dalam merawat kebun. Berdasarkan hasil wawancara dan obeservasi bahwa Kecamatan Silangkitang saat ini untuk monitoring secara berkala sudah di lakukan namun masih terdapat beberapa Kelompok Tani yang masih belum dilakukan monitoring secara berkala hal ini yang

|              |                       |                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                       | <b><i>Prosiding Seminar Nasional "Inovasi Teknologi Pertanian dalam Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan"</i></b> |
| Info Artikel | Received: 09/08/2025  | Vol. 1 No. 1 Tahun 2025                                                                                                 |
|              | Revised : 12/10/2025  | ISSN:                                                                                                                   |
|              | Accepted : 20/12/2025 |                                                                                                                         |

menyebabkan pelaksanaan PSR belum berjalan secara optimal selain itu kurangnya monitoring di lapangan menyebabkan permasalahan teknis tidak segera teridentifikasi dan diperbaiki, yang berdampak pada rendahnya efektivitas program secara keseluruhan.

## KESIMPULAN

Implementasi Program PSR di Kecamatan Silangkitang pada fungsi organizing, actuating, dan controlling belum berjalan efektif. Hambatan utama meliputi kurangnya pendampingan dari dinas atau tim pendamping, serta keterlambatan pencairan dana akibat masalah administrasi, khususnya tumpang tindih lahan. Akibatnya, kegiatan seperti pengolahan lahan, pengadaan bibit, dan perawatan terhambat, yang berdampak pada belum optimalnya peningkatan produksi, produktivitas, dan pendapatan petani.

## UCAPAN TERIMA KASIH

- 1) Kami mengucapkan terima kasih kepada : Politeknik Medan, Pembangunan Pertanian
- 2) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten labuhanbatu Selatan PPL kecamatan Silangkitang serta seluruh petani di Kecamatan Silangkitang.
- 3) Semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Idris I, Mayerni R, Warnita W. Karakterisasi Morfologi Tanaman Kelapa Sawit (*Elaeis Guineensis* Jacq.) Di Kebun Binaan Ppks Kabupaten Dharmastraya. *Jurnal Riset*. 2020 Sep;1:45-53.
- [2] Andriani N, Hutabarat B. Analisis Peranan Penyuluh Pertanian Dalam Penerapan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Di Kecamatan Ba-Horok Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian (Jimtani)*. 2024;4:43-55.

- [3] Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. Statistik Kelapa Sawit Indonesia. Medan: BPS Sumatera Utara; 2022.
- [4] Badan Pusat Statistik Labuhanbatu Selatan. Produksi Perkebunan Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kotapinang: BPS Labuhanbatu Selatan; 2022.
- [5] Panggabean BT, Hutabarat S, Muwardi D. Strategi Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Triton*. 2023;14(1):216-30.
- [6] Arrofi MH. Implementasi Kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Untuk Meningkatkan Produktivitas Dan Kualitas Sawit Rakyat Di Kabupaten Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah [disertasi]. 2022. 8 p.
- [7] Astiti PD, Falatehan AF, Kumala I. Implementasi Peremajaan Sawit Rakyat (Studi Kasus: Kud Tunas Muda Kabupaten Siak-Riau). *Jurnal Agribisnis*. 2022;12(2):126-37.
- [8] Jefri, Wirianata H, Budihardjo K, Harsawardana. Dampak Peremajaan (Replanting) Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Terhadap Pendapatan Ekonomi Dan Kesejahteraan Petani Sawit Di Desa Tri Tunggal SP III Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau Provinsi Tengah. *Jurnal Agribisnis Kalimantan*. 2021; [Volume dan halaman tidak disebutkan dalam teks].
- [9] Direktorat Jenderal Perkebunan. Kabar Baik Bagi Pekebun, Dana PSR Naik 2 Kali Lipat, Ditambah Jadi Rp. 60 Juta [Internet]. Jakarta: Kementerian Pertanian; 2024 [dikutip 2025]. Tersedia dari: [URL harus ditambahkan penulis]
- [10] Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif Dan Konstruktif. Bandung: Alfabeta; 2021.